

## BAB V

### Peranan Kyai Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Pilkada di Kabupaten Kebumen

#### Tahun 2020

#### 5.1. Kyai dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kebumen

##### 5.1.1 Pengaruh NU Pada Pemerintahan Orde Baru

Sejak berdirinya NU, dampaknya baik di pemerintahan maupun masyarakat Indonesia sangat besar. NU akan melanjutkan komitmennya di Indonesia, mengingat tujuan utama didirikannya organisasi ini adalah *baladatu tayyibatun wa rabbun ghafur* (terwujudnya negara yang aman, sejahtera, dan diampuni Tuhan).

Pada masa Orde Baru, khususnya tahun 1970, NU berusaha membela kepentingan agamanya dalam sidang MPR. Muncul dua isu yang meresahkan NU, yakni rencana menawarkan pendidikan kewarganegaraan (pendidikan P-4) kepada seluruh rakyat Indonesia dan pengakuan resmi kelompok sektarian yang berencana mendirikan departemen sendiri di Kementerian Agama. Mengenai masalah kepercayaan, pertanyaan utamanya adalah apakah kepercayaan ini adalah kepercayaan agama atau agama baru. Masalah ini menyangkut penafsiran kata kepercayaan dalam Pasal 29 UUD 1945, di mana kepercayaan, menurut Hadad, adalah keyakinan agamanya (Islam, Kristen, Hindu, Budha) selama hidupnya, daripada beberapa ajaran lainnya.<sup>75</sup>

Saat itu, NU dengan tegas menolak rencana pemerintah tersebut. Kiai Bisri bertemu dengan Soeharto dan meminta agar kelompok agama tersebut tidak

---

<sup>75</sup> Deliar Noer, *Islam dan Politik* (Jakarta: Yayasan Risalah, 2003), 109.

diakui secara resmi karena dianggap kafir dan musyrik. Namun, presiden menolak untuk mengalah, mendorong NU untuk mundur dari pemungutan suara.<sup>76</sup>

Namun, pendeta tidak sepenuhnya kalah dalam pertempuran ini. Meski pemutakhiran P-4 masih berlangsung, diakui kelompok agama tidak mendapat perlindungan dari Kementerian Agama.

Selain dua isu tersebut, pengaruh penting NU lainnya muncul saat pembahasan UU Perkawinan. Pengaruh NU terhadap kehidupan masyarakat Indonesia sangat besar, terutama terhadap kehidupan umat Islam yang merupakan agama terbesar di Indonesia.

Perempuan Indonesia yang telah lama memperjuangkan haknya atas perlindungan hukum, mendapat jawaban di era Orde Baru yang kembali menantang persoalan poligami dan perceraian yang terlalu mudah. Poligami secara bertahap menyebar setelah kemerdekaan, dan wanita tersebut bercerai beberapa kali demi pernikahan dengan wanita lain yang lebih muda.

Pada tahun 1972, RUU antara Muslim dan non-Muslim mengusulkan pembatasan ketat poligami dan pendaftaran pernikahan, mengurangi peran lembaga Islam dan meningkatkan peran administrasi sipil. Rancangan ini langsung ditolak oleh partai-partai Islam, termasuk NU, bersamaan dengan protes dari DPR. Pimpinan PPP di DPR dan banyak tokoh Muslim menilai RUU tersebut pada dasarnya sekuler dan bertentangan dengan doktrin Islam. Umat Islam, misalnya, mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang yang menyatakan bahwa “perkawinan dianggap sah jika dilakukan di hadapan pencatat, dicatat oleh pencatat, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.” Di mata

---

<sup>76</sup> 5Ellyasa KH. Dharwis, Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil (Yogyakarta: LKiS, 1994), 19.

para pemimpin Muslim, undang-undang ini melemahkan peran pengadilan agama Islam dan memberikan hak yang berlebihan kepada pejabat sekuler. Kritikus ini juga menyatakan bahwa RUU ini tidak membahas legalitas pernikahan Muslim jika tidak dicatatkan dalam buku nikah. Menurut kelompok Islam, pendekatan seperti itu melanggar ajaran Islam.<sup>77</sup>

Beberapa perundingan RUU Perkawinan terjadi di luar DPR, yakni antara ABRI dan NU. Hal ini menunjukkan seberapa besar pengaruh ulama, khususnya ulama NU, di dalam dan di luar PPP saat itu. Jenderal-jenderal seperti Soemitro, Daryatmo, dan Soedomo harus puas dengan Kiai Bisri Syansur, yang terkenal kompromistis dan menganjurkan penerapan fikih secara ketat. Kiai Bisri mengumpulkan sembilan imam besar di Jombang untuk menyusun rencana tandingan yang disalurkan melalui PPP di Jakarta.<sup>78</sup>

Lima orang perwakilan NU di DPR tunduk pada dalil kiai tersebut. Mereka sepakat memperjuangkan poligami yang merupakan simbol status sosial masyarakat Kia. Namun, mereka berhasil membuat ulama menerima beberapa larangan poligami. Dalam hal ini mereka tampaknya mendapat dukungan dari Kiai Bisri Syamsuri yang monogami.

Ketika RUU itu diajukan ke DPR pada 6 Desember 1973, hasil kesepakatan NU dengan ABRI dijadikan bahan kerja. Pembahasan RUU ini tidak berjalan mulus, banyak pembahasan yang cukup alot. Namun menjelang berakhirnya kerja parlemen, dua pertiga tuntutan NU dipenuhi. Pasal 2, topik pembahasan paling kontroversial di DPR, diubah sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

---

<sup>77</sup> Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), 129.

<sup>78</sup> Feillard, *NU Vis A Vis Negara*, 192.

kepercayaan, dan setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pengaruh NU dalam penyusunan undang-undang ini membawa hal positif bagi masyarakat Indonesia. NU yang saat itu masih menjadi bagian dari partai politik bernama PPP tetap tidak melupakan mata pelajaran sosial keagamaan yang menjadi identitas NU sebelumnya Jam'iyah Diniyah dan pewaris para Nabi.

### **5.1.2 Peran Kyai di Pemilihan Kabupaten Kebumen**

Citra Kyai di masyarakat, di satu sisi, adalah kelompok terpelajar di tingkat desa, tidak hanya itu. Oleh karena itu, status keilmuan kaum Kyai dalam beberapa hal lebih unggul dari masyarakat biasa di mana Kyai dan Pesantren berada. Sikap inilah mengapa sejarah mengklasifikasikan Kyai sebagai kelompok terhormat, meskipun dari sudut pandang sosiologis Kyai juga dikenal sebagai elit tradisional, karena mereka sering dilihat di desa sebagai filter budaya eksternal dalam konteks sosial.<sup>79</sup>

Kyai dianggap sebagai kepemimpinan Islam terkemuka, terutama di wilayah Jawa, dan telah memainkan peran penting dalam perkembangan pendidikan, sosial, budaya dan politik selama berabad-abad.<sup>80</sup> Karena pengaruhnya yang besar di masyarakat, seorang Kyai mampu membawa masyarakatnya ke tempat yang diinginkan, sehingga seorang Kyai mampu mengendalikan situasi sosial masyarakat yang penuh dengan perkembangan dan perubahan.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> H. Samsul Nizar, *Sejarah Sosial Dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam Nusantara*, (Jakarta , Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 201

<sup>80</sup> Ibid

<sup>81</sup> Ibid

Dengan pengaruh sosial Kyai yang tinggi, Kyai secara tidak langsung diposisikan sebagai otoritas tertinggi di masyarakat, dan bahkan pemerintah formal seperti pemerintah desa dapat mematuhi Kyai. Selain itu, Kyai juga berfungsi sebagai tokoh agama dalam masyarakat, meliputi peran spiritual, pendidikan, pengasuhan, dan sosial budaya, serta tokoh yang terlibat dalam politik sebagai partisipan, pendukung, dan aktor.

Kyai NU memiliki peran politik yang signifikan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu pada pilkada. Kyai NU mendorong masyarakat melalui pengajian-pengajian dan pesan-pesan sosial yang menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang baik dan kosongnya kepemimpinan yang berpotensi merusak bangsa. Konsep kekuasaan karismatik dapat diaplikasikan dalam hal ini, karena kyai NU memiliki pengaruh karismatik yang kuat terhadap masyarakat setempat sehingga dapat memobilisasi mereka untuk memilih calon yang didukung.

Kita dapat melihat fungsi spiritual kiai, kiai dianggap oleh masyarakat tradisional sebagai sosok yang paling memahami agama, dan setiap sugesti atau petuah kiai dianggap sejalan dengan hukum Islam. Peran pendidikan Kyai dapat dilihat dari mana Kyai mengajarkan pengajaran agama kepada warga di sekitar tempat tinggalnya atau di lembaga pendidikan yang ia dirikan.<sup>82</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kiai memegang peranan penting dalam masyarakat karena kiai dianggap sangat religius dan sejalan dengan hukum syariah, sehingga membahas moralitas dalam konteks penelitian ini

---

<sup>82</sup> Robby darwis nasution, kyai sebagai agen perubahan sosial dan perdamaian dalam masyarakat tradisional, vol 19 no, 2 (2017) h. 183

konsisten dengan pembahasan di atas karena kiai mampu membangun masyarakat yang baik dan contoh bagi masyarakat.

### **5.1.3 Kyai Nahdlatul Ulama (NU) dalam Politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2020**

Sejak zaman dahulu, kehidupan di masyarakat tidak lepas dari peran para ulama. Tidak heran, jika posisi ulama di lingkungan masyarakat bahkan negara memiliki eksistensi yang penting. Selain itu, masyarakat Indonesia mayoritas merupakan umat beragama Islam. Kondisi inilah yang menjadi faktor utama ulama memiliki peran yang sangat luas. Tidak hanya perihal agama, peran ulama juga telah merambah ke berbagai bidang lainnya seperti ekonomi, sosial, hingga politik. Sebab, banyak masyarakat yang menjadikan ulama sebagai rujukan untuk berbagai hal. Tentu, hal inilah yang menjadikan sosok dan posisi ulama sangat diperhitungkan, terutama Kyai.

Pembahasan perihal Kyai di dunia politik, faktanya bukan fenomena dan isu baru. Sejak order baru, Kyai telah memiliki peran yang begitu penting di dunia politik. Hal ini karena, Kyai mampu melegitimasi aturan hukum dan juga kebijakan politik. Tidak heran jika Kyai dijadikan sebagai stempel legitimasi tersebut. Melihat hal tersebut, tentunya Kyai juga dapat disebut sebagai *agen of control* dalam kebijakan serta hukum yang diberlakukan. Jika peran Kyai di masa dahulu sangat diperhitungkan, lantas bagaimana dengan masa sekarang, apakah peran Kyai masih sama seperti dulu atau bahkan lebih dalam lagi.

Kyai yang memiliki peran besar dalam hal pendidikan, tentunya juga memiliki peran sebagai seorang pemimpin dalam masyarakat secara umum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh <sup>83</sup> bahwa kyai merupakan pemimpin informal bagi masyarakat di lingkungannya. Hal ini karena sebagian besar nasihat serta ajurannya ditaati oleh kebanyakan orang, terutama bagi sebagian besar anggota atau pengikutnya. Oleh karena itu, kyai dianggap memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Bagi sebagian besar warga NU, kyai menjadi ikon penting dalam struktur kehidupan bermasyarakat, terutama menjadi figure teladan besar bagi masyarakat secara umum.

KH. MA. Sahal Mahfudh menyampaikan pendapatnya dalam buku <sup>84</sup> yang berjudul “Jihad Kebangsaan dan Kemanusiaan Nahdlatul Ulama” menjelaskan bahwa politik NU merupakan politik yang ada di tingkat tinggi, yaitu politik kerakyatan dan kebangsaan dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara dari berbagai kepentingan kelompok yang sektarian dan primordial.

Maruf, mahasiswa dari IANU Kebumen juga memberikan komentar perihal Kyai atau ulama dalam politik, sebagai berikut:

*“Dengan adanya keberadaan Arif yang tidak lain seorang anggota NU dan mengikuti politik. Tentunya, tidak ada masalah.”*

Melihat keterlibatan Arif di Politisi, Maruf juga tidak melewatkan untuk beragumen:

*“Menurut saya, Arif termasuk orang cerdas. Sebab, beliau melihat peluang dan telah membaca peta politi di Kabupaten Kebumen ini. Selain pernah menjadi polisi dan terjun sebagai pengurus NU. Tentu, beliau telah mengetahui sebagian besar lingkungan warganya.”*

---

<sup>83</sup> Uud Wahyudin and Agus Setiawan, “Karakteristik Dan Peran Kyai Dalam Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Di Pesantren,” *Jurnal Manajemen Komunikasi* 3, no. 2 (2019): 122.

<sup>84</sup> Jamal Ma'mur Asmani, “Jihad Kebangsaan dan Kemanusiaan Nahdlatul Ulama,” Yogyakarta: IRCiSoD (2022) : 200.

Pernyataan Maruf menunjukkan bahwa dalam pemikiran dan pandangan masyarakat, keberadaan ulama (Arif sebagai anggota NU) dalam politik tidak menjadi masalah. Ini menunjukkan adanya budaya politik yang menyatakan bahwa ulama memiliki peran dan pengaruh besar dalam politik, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin dan membantu memimpin masyarakat. Maruf sebagai mahasiswa yang terlibat dalam pemikiran politik, memiliki pandangan yang positif terhadap keterlibatan ulama dalam politik. Maruf menganggap bahwa ulama yang terlibat dalam politik, seperti Arif, merupakan individu yang cerdas dan pandai melihat peluang. Maruf juga menyatakan bahwa Arif sudah mengetahui lingkungan masyarakatnya dengan baik karena memiliki pengalaman sebagai polisi dan pengurus NU.

Teori elite politik menekankan bahwa kekuasaan dan pengaruh dalam politik terkonsentrasi pada sekelompok elite atau pemimpin terpilih. Dalam hal ini, Maruf melihat Arif sebagai seorang pengurus NU yang memiliki kecerdikan dan memahami situasi politik di Kebumen, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu elite politik di wilayah tersebut.

Teori elite politik Robert Putnam mengatakan bahwa keberpihakan politik dan pengaruh elite sangat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan partisipasi masyarakat dalam politik. Dalam pernyataan Maruf, keterlibatan Arif sebagai anggota NU dan pengurus NU, serta pernah menjadi polisi, menunjukkan bahwa Arif merupakan elite politik yang memiliki peluang dan memahami peta politik di Kabupaten Kebumen. Maruf juga menganggap Arif sebagai orang cerdas karena kemampuannya untuk memahami lingkungan masyarakat

sekitarnya. Oleh karena itu, keterlibatan Arif dalam politik menurut teori Putnam mempengaruhi pembuatan kebijakan dan partisipasi masyarakat dalam politik.

#### **5.1.4 Sikap Kyai NU Terhadap Politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2020**

Keberadaan Kyai di lingkungan masyarakat Kebumen menjadi sosok yang sangat diagungkan dan figure panutan dalam berberapa aspek kehidupan, seperti perilaku, agamai, kebijakan, hingga politik. Apalagi bagi warga NU, tentu mereka memiliki budaya dan cara sendiri dalam berikap pada Kyai. Conohnya saja, pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) tahun 2020 lalu, Kyai NU menjadi sorotan bagi sebagian besar politisi.

Hampir sebageian Kyai akan masuk dalam agenda para politisi dalam masa Pilkada. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa sosok Kyai memiliki peran penting dan masuk pada strategis dalam Pilkada. Keberadaan Kyai pada Pilkada dapat sebagai sosok orang tua, guru, pemimpin, atau sebagainya yang berarti para politisi sangat memperhitungkan posisi Kyai.

Pada kontestasi Pilkada, Kyai menjadi target utama sebageian besar politisi dalam kiprahnya mencalonkan diri sebagai pimpinan di suatu daerah. Hampir sebageian besar dari politisi beranggapan bahwa Kyai menjadi pitu atau jembatan untuk mencari simpati masa. Sebab, hal inilah yang sangat diperlukan oleh calon Pilkada. Simpat masa yang tinggi, tentu akan meningkatkan suara pemilihan terbanyak, sehingga mampu membawa kandidat Pilkada memperoleh kemenangan tentunya.

Kyai Fakhrudi merupakan sosok ulama yang memiliki karisma tinggi serta peran penting khususnya di Kabupaten Kebumen. Demisioner Rois MWC

Kebumen yang tidak lain adalah pendiri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin ini selain sebagai panutan para santri dan masyarakat. Selain menjadi sosok orang tua dan guru, Kyai Fakhrudi juga seorang yang peduli terhadap kesejahteraan ODGJ. Hal ini terbukti dengan keberadaan pasien dengan gangguan jiwa yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin miliknya.

Perihal mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kacamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2020, berikut pendapat Kyai Fakhrudi:

*“Perihal Pilkada kemarin dan adanya tokoh dari warga NU. Tentunya, menurut saya tidak masalah. Sebab, yang saya ketahui Arif memiliki jasa pada NU dan saya tentunya mendukung.”*

Kyai Fakhrudi dari PonPes Hidayatul Mubtadiin ini juga menambahkan bahwa:

*“Para pemimpin NU tentunya sudah bisa menilai bagus, apalagi dari kalangan NU sendiri. Saya sebagai yang ada dibawah tentu mengikuti pemimpin “sam'ina wa'athana”. Pastinya saya akan memilih yang sudah ada daripada harus memilih kotak kosong.”*

Pernyataan Kyai Fakhrudi ini menunjukkan perilaku politik yang memfokuskan pada kepentingan kelompok atau komunitas. Dalam hal ini, Kyai Fakhrudi memberikan prioritas pada kelompok NU yang menjadi kelompok dari pemimpin-pemimpin yang ia ikuti. Ini tercermin dalam pernyataannya yang menyatakan bahwa ia akan memilih kandidat yang sudah dikenal daripada memilih kandidat yang tidak dikenal.

Kyai Fakhrudi juga menyatakan bahwa pemimpin NU sudah bisa menilai bagus dan ia sebagai anggota NU akan mengikuti pemimpin "sam'ina wa'athana".

Ini menunjukkan bahwa perilaku politiknya didasarkan pada sikap dan keyakinan terhadap pemimpin NU, seperti pengikut dan pemahaman terhadap ajaran NU. Dalam hal ini, teori perilaku politik memperlihatkan bahwa Kyai Fakhruddin memiliki perilaku politik yang terpengaruh oleh identitas dan afiliasi kelompok, sikap dan keyakinan terhadap pemimpin, serta preferensi dan pilihan yang ada dalam pemilihan politik. Kyai Fakhruddin memiliki sikap orientasi menuju tujuan politik, yaitu memilih pemimpin NU yang dipandang bagus oleh para pemimpin NU sendiri. Ini menunjukkan adanya distribusi pola orientasi politik di antara masyarakat, di mana Kyai Fakhruddin memiliki sikap yang konsisten dengan pemimpin NU dalam hal memilih pemimpin.

Kyai memainkan peran dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kebumen karena mereka dianggap sebagai pemimpin spiritual dan moral oleh masyarakat. Kyai memiliki pengaruh besar terhadap pandangan dan sikap masyarakat terhadap berbagai masalah, termasuk pemilihan kepala daerah. Mereka dapat mempengaruhi pilihan masyarakat melalui ajaran dan pandangan mereka. Kyai juga dapat mempengaruhi pemilihan dengan memilih dan mendukung calon tertentu. Kyai juga memiliki keahlian dan pengalaman dalam memimpin dan memahami masalah masyarakat sehingga dapat mempengaruhi pemikiran pemilih dalam memilih calon pemimpin. Oleh karena itu, peran Kyai dalam pemilihan kepala daerah sangat penting dan mempengaruhi hasil pemilihan.

Menurut teori Linton tentang peran, individu memiliki peran-peran sosial yang diterima oleh masyarakat dan diharapkan memenuhi ekspektasi sesuai dengan peran tersebut. Dalam hal ini, Kyai Fakhruddin memiliki peran sebagai

pemimpin dalam organisasi NU dan memiliki ekspektasi untuk mematuhi dan mendukung pemimpin NU. Oleh karena itu, Kyai Fakhruddin mendukung Arif sebagai calon kepala daerah yang dipilih oleh pemimpin NU.

## 5.2. Peran Kyai Dengan Sumber Kekuasaan

Peran kyai semakin kuat dan erat hubungannya dengan masyarakat. Hampir seluruh masyarakat yang agama Islam, meyakini bahwa keberadaan kyai membawa berkah bagi lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, masyarakat juga percaya bahwa kyai memiliki peran dalam kondisi struktur dan pola kekuasaan (kepemimpinan) kyai dalam dunia pesantren memiliki kesinambungan. Oleh karena itu, kyai memiliki jaringan-jaringan sosial yang terikat secara internal maupun eksternal di pesantren. Sementara, menurut Dirjosanjo (1999) dalam Thabrani (2023), bahwa skala derajat kekuasaan kyai terbagi menjadi tiga kategori, diantaranya yaitu kyai langgar, kyai pesantren, dan kyai tarekat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kyai NU masuk dalam kategori kyai pesantren. Kyai-kyai kategori ini memiliki ikatan hubungan yang sangat erat dengan masyarakat luas. Sesuai dengan penjelasan dari Haryanto (2010) bahwa kyai kategori ini memiliki hubungan yang erat dengan santri dan keluarganya secara tidak langsung juga menjadi penganut kyai tersebut. Kyai membangun bentuk sistem sosial yang sangat luar biasa kuatnya, yang mengacu pada jalan kekerabatan.

Relasi kyai dengan kekuasaan dalam hal ini pemerintah daerah Kebumen telah terjalin sangat erat satu sama lain saling mendukung dalam kapasitas dan fungsi sosial dalam bermasyarakat. Bentuk hubungan yang dapat terlihat seperti a pelibatan tokoh masyarakat dan kyai dalam kegiatan keagamaan seremonial di

hampir semua tingkat Pemerintahan. Relasi kyai-kyai NU di Kebumen sendiri terjadi simbiosis mutualisme yang artinya saling menguntungkan. Jalinan komunikasi antara pemerintah dengan para kyai terjalin baik lewat acara- acara Peringatan Hari Besar Islam( PHBI) maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh pesantren. sedangkan pemerintah merasa kebijakan- kebijakannya menemukan legitimasi dari kiai, tidak hanya menyangkut kebijakan dalam perihal sosial agama, namun pula dalam pembangunan fisik. Pemerintah juga memerlukan wujud kyai guna menuntaskan kasus sosial dalam publik. Tetapi selaku tokoh agama serta tokoh masyarakat menjalankan komunikasi dengan kekuasaan mesti dengan cara yang benar, apabila tidak akan menuju pada kegiatan yang tidak terpuji, kiai mesti memelihara harga dirinya.

### **5.3. Peran Kyai NU dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2020.**

Hampir seluruh Kyai memiliki anggota atau pengikut yang menerima akan pendapat dan keputusannya. Kyai dan politisi ibaratkan sebagai saudara kembar yang saling berdampingan. Hubungan Kyai dengan pemimpin daerah pun demikian saling berdampingan. Seperti halnya dengan pemimpin yang berwenang dalam menetapkan sebuah kebijakan bagi rakyatnya, sedangkan Kyai hadir sebagai salah satu suara yang mewakili suara rakyat dengan kekuatan otoritas alamiah yang dimilikinya sebagai *agen of control* terhadap ketetapan atau kebijakan yang ditetapkan. Layaknya seperti hubungan antara politik dengan agama, dua hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan.

Dunia politik, khususnya di Indonesia keberadaan Kyai bukan hanya sebagai orang yang paham dan ahli dalam bidang agama, namun juga sosok yang

tidak perilakunya akan diikuti oleh para pengikut. Figur ini sering dijadikan masyarakat sebagai contoh berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, banyak juga yang berpendapat bahwa Kyai merupakan pilihan Tuhan yang mendapatkan kepercayaan serta memiliki karisma, sehingga menjadikan setiap perilakunya di contoh dan di anggap benar. Inilah yang menjadikan Kyai memiliki daya Tarik tersendiri, sehingga para politisi membidik para ulama. Dengan demikian, ketika dapat merangkul Kyai dalam kontestasi pilkada harapan untuk meraih kemenangan akan memiliki peluang yang sangat besar.

Kyai Fakhruddin merupakan Kyai penting yang juga demisioner rois MWC Kebumen beliau memiliki koneksi orang-orang NU yang luas, tidak hanya bagi warga nadliyin tapi juga di kalangan masyarakat umumnya. Dari wawancara secara langsung dengan Kyai Fakhruddin, beliau tidak dapat dikatakan sebagai tim sukses dari pasangan calon tertentu walaupun beliau menyampaikan pilihan terhadap pasangan calon tertentu, beliau memilih sebagai bentuk dari partisipasi sebagai warga Negara. Namun beliau tidak menampik adanya hubungan Kyai dalam proses demokrasi ini. Kyai dalam keterlibatannya dalam politik pasti memiliki kriteria ada yang merasa tidak perlu menyampaikan pilihannya pada pasangan calon tertentu atau netral, menjadi supporter, dan ada yang menjadi pemberi do'a restu pada semua pasangan calon. Walaupun demikian, memang tidak dikatakan bahwa 100% masyarakat akan memilih pilihan yang dikehendaki oleh Kyai tertentu, tetapi pandangan atau kecenderungan ulaman terhadap pasangan calon tertentu bisa menjadi rujukan atau referensi masyarakat dalam memilih terlebih mereka yang merupakan pengikut setia dan santri.

Kyai pada hakikatnya akan sangat menjaga hubungan terhadap siapapun tanpa terkecuali, lebih dalam hal ini pada para politisi. Kyai sangat populer dalam kalangan para politisi, sehingga bukan suatu yang baru ketika kedekatan Kyai dengan politisi terlihat. Kedekatan ini merupakan sesuatu yang wajar dalam masyarakat, artinya Kyai tidak pilih-pilih dalam menerima siapapun yang datang / *sowan* ke rumah Kyai tersebut. Ketika terdapat sebuah kedekatan antara Kyai dan juga politisi ini menjadikan wadah untuk saling mengenal dan Kyai pun dapat menilai bagaimana karakter calon-calon pemimpin daerahnya sebagai landasan dalam menentukan pilihan, tidak hanya itu Kyai pun dapat memberikan arahan serta nasihat-nasihat yang membangun bagi para politisi.

Selama proses wawancara, Kyai menjelaskan bahwa memiliki kriteria dalam memilih calon yang diunggulkannya. Berikut wawancara dengan beliau Kyai Fakrudin:

*“Menjadi seorang rakyat, tentu berkewajiban untuk memiliki pemimpin. Kalau saya ditanya dan boleh menjawab, tentunya saya sangat mendukung calon Arif-Rista pada Pilkada Kebumen 2020. Hal ini karena, kedua calon merupakan seseorang yang mengikuti ajaran pimpinan Kyai-Kyai NU. Setiap memilih, saya selalu mempertimbangkan jati diri agama calon tersebut yang mana tidak lain adalah orang Islam. Selain itu, saya juga melihat aah kiranya bisa memimpin dan disenangai oleh masyarakat luas, terutama di Kebumen.”*

Menurut teori elite politik Robert Putnam, dalam proses pemilihan pemimpin, peran elite atau kelompok elit sangat memegang peran penting dalam mempengaruhi pemilihan. Dalam hal ini, Kyai Fakhruddin sebagai salah satu anggota elite di masyarakat, memiliki pengaruh dan memegang kendali dalam

mempengaruhi pemilihan pemimpin. Ia menyatakan bahwa memilih pemimpin harus mempertimbangkan jati diri agama calon dan kemampuannya dalam memimpin dan disenangi oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Kyai Fakhruddin memiliki pemikiran dan pandangan yang terfokus pada kepentingan agama dan masyarakat, yang akan mempengaruhi pemilihan pemimpin oleh masyarakat yang ia pengaruh.

Teori peranan politik menjelaskan bahwa setiap individu memiliki peran-peran yang berbeda dalam masyarakat dan dalam proses politik. Peran-peran tersebut bisa diterima secara tradisional atau diterima melalui proses sosialisasi. Dalam hal ini, Kyai Fakhruddin memainkan peran sebagai seorang pemimpin masyarakat dan pemimpin agama yang memiliki pengaruh dalam mempengaruhi pemilihan calon kepala daerah. Oleh karena itu, peran Kyai ini sangat penting dan memiliki dampak yang besar dalam proses pemilihan calon kepala daerah.

Kyai juga menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan dengan pimpinan Kyai-Kyai NU, dan mengikuti ajaran mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Kyai berada dalam posisi sebagai anggota dari elite politik yang memiliki pengaruh dan hubungan dengan kelompok lain dalam proses politik. Kyai Fakhruddin juga memperlihatkan bahwa dalam memilih calon, ia mempertimbangkan kualitas calon tersebut untuk memimpin dan disenangi oleh masyarakat, yang menunjukkan bahwa Kyai Fakhruddin memegang pandangan bahwa pemimpin harus memiliki popularitas dan kredibilitas dalam masyarakat.

Dalam teori elite politik, pemimpin ditentukan oleh segelintir kelompok atau individu yang memiliki kekuatan dan pengaruh dalam masyarakat. Dalam hal ini, Kyai-Kyai NU dikenal sebagai pemimpin spiritual dan dianggap sebagai elite

oleh masyarakat, sehingga pemilihan calon yang mengikuti ajaran mereka mencerminkan orientasi agama dan pengaruh dari kelompok elite. Kyai Fakhruddin yang menyatakan dukungan untuk calon Arif-Rista juga menunjukkan bahwa beliau mempertimbangkan jati diri dan pandangan agama calon serta kemampuan calon untuk memimpin dan disukai oleh masyarakat luas. Ini menunjukkan bahwa orientasi dan pandangan elite, dalam hal ini Kyai-Kyai NU, memainkan peran penting dalam pemilihan pemimpin oleh individu.

Kyai memang menjadi tambahan energi dalam sebuah kontestasi politik, seperti Pilkada ini. Dalam hal ini para politisi yang basisnya mencari dukungan kepada para Kyai merupakan suatu hal yang sah dan wajar. Mereka mencari dukungan seperti itu karena untuk mendapatkan kemenangan dalam pemilihan kepala daerah yang mana itulah tujuannya. Sehingga mengapa perlunya Kyai untuk bisa melihat dan memahami serta ketelitiannya dalam membaca kondisi politik yang ada. Sebab dukungan yang Kyai berikan kepada politisi/pasangan calon tertentu akan sangat berpengaruh pada perilaku masyarakat, dimana pilihan Kyai menjadi referensi atau bahkan rujukan bagi mereka dalam menentukan pilihan. Ketika pilihan Kyai itu benar dan tepat maka akan memberikan pengaruh positif terhadap pola pikir masyarakat itu sendiri.

### **5.3.1 Peran Kyai Fakhruddin Pada Calon Pilkada Arif-Rista**

Kyai Fakhruddin merupakan pemimpin Rois MWC di Kabupaten Kebumen. Tidak heran, jika Kyai Fakhruddin menjadi tokoh paling berperan di Kabupaten Kebumen, khususnya di agama dan persepsi masyarakat sekitar. Sebagai tokoh

yang sangat berperan, tentu Kyai Fakhruddin menjadi sosok suri tauladan bagi warga Kebumen.

Pada pilkada kabupaten Kebumen pada tahun 2020 hanya terdapat satu pasangan calon yaitu Arif-Rista. Arif yang merupakan bagian dari elit kepengurusan PCNU Kebumen membuat para kyai NU mendeklarasikan mendukung pasangan Arif-Rista. Terdapat kekhawatiran kyai-kyai NU terhadap partisipasi masyarakat pada pemilu yang dari data KPU presentase keikutsertaan masyarakat hanya berkisar 60%.<sup>85</sup> Terdapat kemungkinan yang cukup besar kotak kosong pada pilkada kabupaten Kebumen memenangkan kontestasi politik.

Pada masa Pilkada 2020 lalu, Kyai Fakhruddin menjadi salah satu tokoh agama yang paling banyak dikunjungi oleh para calon pemimpin daerah, salah satunya calon Arif-Rista yang secara intens selalu datang untuk mendapatkan nasehat dan doa. Melihat hal tersebut tentunya, peran Kyai Fakhruddin bagi kemenangan calon Arif-Rista di Pilkada 2020 sangat besar. Selain untuk mendapatkan nasehat dan doa, tentunya Arif-Rista mendapatkan dukungan yang penuh dari Kyai Fakhruddin. Yang secara tidak langsung, Kyai Fakhruddin berperan sebagai tokoh agama yang ikut menyuarakan calon Arif-Rista kepada pengikutnya. Yang secara tidak langsung, Kyai Fakhruddin berperan sebagai tokoh agama yang ikut menyuarakan calon Arif-Rista kepada pengikutnya. Adapun upaya atau peran yang diberikan Kyai Fakhruddin terhadap calon Arif-Rista ialah dalam bentuk support, seperti mengajak pasangan ini ikut dalam kegiatan kyai, menyebutkan paslon dalam acara-acaranya, dan memberi pencerahan pengikutnya mengenai pilkada yang tepat.

---

<sup>85</sup> [Post - Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen \(kebumenkab.go.id\)](https://www.kebumenkab.go.id)

Peran kyai tentu banyak sorotan dari berbagai kalangan diantaranya ialah masyarakat. Menurut Lukman Hakim seorang wiraswasta yang berusia 42 tahun mengatakan bahwa *“Kyai sebagai penyeimbang atas isu-isu yang beredar di masyarakat, juga sebagai peredaman konflik internal di masyarakat, juga sebagai peredam konflik internal di masyarakat yang terjadi akan adanya pilkada”*.

Dalam pernyataan di atas, peran kyai dalam masyarakat didefinisikan sebagai penyeimbang atas isu-isu yang beredar, peredam konflik internal, dan penstabil ketika ada pilkada.

Jika dilihat melalui teori budaya politik (Almond Verba), teori ini menekankan bahwa budaya politik memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana masyarakat memahami dan merespon isu politik, termasuk dalam hal pemilihan pemimpin. Dalam hal ini, kyai dipandang sebagai seorang yang memiliki pengaruh dan otoritas dalam masyarakat, yang bisa membantu menjaga stabilitas dan menyelesaikan masalah internal. Oleh karena itu, Lukman Hakim menganggap peran kyai sangat penting dalam membantu mempertahankan keharmonisan masyarakat selama proses pemilihan kepala daerah.

Menurut teori perilaku politik, peran sosial seperti kyai dapat mempengaruhi perilaku politik individu dan kelompok. Kyai dapat mempengaruhi isu-isu politik melalui pengaruh dan pengaruh moral yang dimilikinya sebagai panutan masyarakat. Kemampuan kyai untuk memediasi konflik juga dapat membantu menstabilkan situasi politik dan meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik yang lebih besar.

Sebagai peredam konflik internal, kyai dapat membantu memecahkan masalah yang timbul selama pilkada dengan memfasilitasi diskusi dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Ini dapat membantu memastikan bahwa pilkada berlangsung dengan aman dan adil.

Dengan demikian, peran kyai sebagai sosok panutan dan tokoh penting dalam masyarakat dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat dan membantu memastikan stabilitas politik dan keadilan.

Sementara Ahmad Amin Mustofa selaku Carik Desa Kebumen, berpendapat bahwa *“Bagi saya peran kyai, peran tokoh agama saya kira sangat penting sekali karena hari ini edukasi masyarakat terkait politik tidak melulu menjadi tanggung jawab instansi pemerintah saja tapi lebih kepada tanggung jawab bersama. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk edukasi masyarakat untuk melek politik, sadar akan kepentingan politik, sadar terhadap bagaimana peran kita mengenai politik sehingga orang itu harus sadar ketika kita bangun tidur sampai mau tidur kembali itu arahnya menjadi arah politik. Kebijakan yang ada dalam sehari-hari itu imbas dari kebijakan politik. Sehingga saya kira kyai mempunyai power untuk itu karena memiliki masanya sendiri.”*

Dalam pernyataan Ahmad Amin Mustofa, dia menekankan pentingnya peran kyai dan tokoh agama sebagai pemegang peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang politik. Beliau menyatakan bahwa tanggung jawab edukasi masyarakat mengenai politik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama bagi setiap orang. Kyai, sebagai tokoh agama, memiliki power dan masa untuk melakukan edukasi tersebut.

Dalam teori perilaku politik, tokoh-tokoh agama memiliki peran dan pengaruh yang besar dalam mempengaruhi perilaku dan sikap politik masyarakat. Kyai sebagai tokoh agama memiliki posisi dan kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat, sehingga mereka dapat mempengaruhi pandangan dan tindakan masyarakat terkait politik. Dalam hal ini, kyai memiliki power untuk mempengaruhi dan memengaruhi pandangan masyarakat terkait isu-isu politik yang sedang beredar.

Secara keseluruhan, pernyataan Ahmad Amin Mustofa menunjukkan betapa pentingnya peran kyai dan tokoh agama dalam membentuk sikap dan perilaku politik masyarakat. Mereka memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi pandangan masyarakat terkait politik dan menjadi penyeimbang dan peredam konflik internal yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

Kepala Desa Grenggeng, Kabupaten Kebumen yaitu Eri Listiawan juga ikut menanggapi perihal keberadaan Kyai NU di masa pilkada ini. Berikut pernyataan Eri Listiawan:

*“Kalau NU itu kan ada dua NU struktur dan NU kultur amaliyahnya NU namun dia tidak masuk struktur NU maka tidak bisa di instruksi secara prespektif struktural. Karena kemarin itu lebih dominannya selain pak Arif sebagai kandidat kepala daerah dan beliau adalah pengurus NU ditingkat cabang sebagai bendahara umum, musuhnya (Kotak Kosong) juga menjadi pengaruh bagi orang NU. Dalam pemahaman orang NU ini kekosongan kepemimpinan itu sama saja ke kosongan imam jama'ah, itu juga sebagai faktor pengaruh. Artinya bukan semata-mata persoalan karena beliau sebagai kandidat itu bendahara NU tapi juga karena musuhnya kotak kosong. Jadi kemudian mayoritas orang NU*

*daripada kepemimpinannya memilih kotak kosong karena ini juga dokma (doktrin agama) maka masyarakat lebih memilih dia (Arif) daripada tidak ada pemimpin. Jadi bukan ahanya NU dan non-NU tetapi musuhny itu kotak kosong, kebanyak orang NU itu yang tidak memilih lebih kepada mereka karena tidak cocok dengan kandidatnya dan tidak memilih kotak koson. Semata-mata bukan hanya struktur NU tapi lebih kepada karena musuhny kotak kosong jadi mayoritas para pemilih NU lebih memilih beliau (Arif).” – kata Eri Listiawan.*

Pernyataan Eri Listiawan mengenai peran Kyai NU dalam masa pilkada, menunjukkan adanya perbedaan antara struktur NU dan NU kultur yang dimilikinya. Dalam hal ini, Eri menyatakan bahwa Kyai NU yang tidak masuk dalam struktur NU tidak bisa diberikan instruksi secara prespektif struktural. Meskipun demikian, Kyai NU tetap memiliki pengaruh bagi masyarakat NU, seperti dalam hal pemilihan pemimpin.

Melihat teori peranan politik, peran seseorang dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti institusi sosial, norma dan nilai-nilai, dan situasi politik. Dalam hal ini, peran Kyai NU sebagai tokoh agama dan pemimpin masyarakat memiliki pengaruh besar dalam pemilihan pemimpin.

Eri menyatakan bahwa mayoritas masyarakat NU lebih memilih Arif sebagai kandidat kepala daerah karena beliau sebagai bendahara umum pengurus NU ditingkat cabang. Namun, Eri juga menyatakan bahwa pemilihan ini juga dipengaruhi oleh faktor musuhny, yaitu "kotak kosong". Masyarakat NU lebih memilih Arif karena doktrin agama mereka yang menganggap kekosongan kepemimpinan sama dengan kekosongan imam jama'ah.

Bentuk peran politik kyai adalah sebagai agen sosialisasi politik. Kyai menggunakan sumber daya sosial yang dimilikinya, yaitu posisinya sebagai tokoh agama dan pengaruh dakwahnya untuk menggerakkan masyarakat dalam pilkada dan mempengaruhi mereka untuk memilih pasangan calon tertentu. Kyai berperan sebagai agen sosialisasi politik dengan cara menyebarkan doktrin agama untuk mempengaruhi pandangan politik masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi politik. Melalui peran ini, kyai dapat memengaruhi pilihan politik masyarakat dan mempengaruhi hasil pilkada.

Secara keseluruhan, peran Kyai NU dalam masa pilkada sangat penting bagi masyarakat NU. Mereka memiliki pengaruh besar dalam pemilihan pemimpin dan memainkan peran penting dalam menentukan arah politik masyarakat. Peran Kyai NU dalam pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2020 dipengaruhi juga oleh faktor-faktor budaya politik seperti struktur dan kultur NU, pengaruh pemimpin NU, dan doktrin agama yang mempengaruhi perilaku dan sikap politik masyarakat.

*“Dalam posisi pilkada kemarin tentu kyai tidak secara langsung menunjukkan keberpihakan, walaupun bisa dikatakan setiap orang mempunyai hak pilih cuman ini pengkondisian masa tidak begitu masif. Ini yang saya amati masyarakat kita sudah cukup cerdas sehingga tidak melulu gampang terakomodir oleh siapapun menurut saya. Jadi, boleh saja orang menggerakkan tetapi ketika sampai pada pilihan kita tidak ada yang bisa membaca secara ril arahnya kemana itu. Tidak hanya di pilkada tapi hampir semua pemilu menurut saya kyai sebagai sosok panutan dan tokoh tetap ada semacam power saja tapi ketika ada*

*sikap mendukung A menurut saya belum tentu juga.” – kata Ahmad Amin Mustofa.*

Pernyataan ini mengatakan bahwa kyai sebagai sosok panutan dan tokoh memiliki power dalam pemilu. Namun, posisi mereka tidak secara langsung menunjukkan keberpihakan dan tidak bisa dibaca secara ril arahnya. Masyarakat cerdas dan tidak mudah terakomodir oleh siapapun. Sikap mendukung seseorang belum tentu juga berpengaruh pada pilihan masyarakat. Teori peran politik menyatakan bahwa peran seseorang dalam masyarakat bisa berubah-ubah tergantung konteks dan situasi. Dalam hal ini, peran kyai sebagai panutan dan tokoh memiliki power dalam pemilu namun tidak secara langsung memengaruhi pilihan masyarakat.

Dalam teori perilaku politik Surbakti, partisipasi politik dan pengaruh tokoh agama dalam pemilihan umum merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku pemilih. Kyai NU memiliki posisi yang kuat sebagai tokoh agama dan panutan bagi masyarakat, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku pemilih. Secara keseluruhan, pernyataan menunjukkan bahwa pengaruh kyai NU dalam pilkada memiliki peran yang penting dan mempengaruhi perilaku pemilih, meskipun tidak selalu secara langsung. Namun, faktor-faktor seperti pendidikan, ekonomi, budaya, dan doktrin agama juga mempengaruhi partisipasi politik dan pemilihan.

Bentuk peran politik kyai merupakan sebagai agen sosialisasi politik. Kyai memakai sumber daya sosial yang dimilikinya, yakni posisinya selaku tokoh agama serta pengaruh dakwahnya guna menggerakkan masyarakat dalam pilkada serta pengaruh mereka untuk memilih pasangan Arif- Rista. Kyai berfungsi

selaku agen sosialisasi politik dengan cara menyebarkan doktrin agama buat pengaruhi pemikiran politik masyarakat dan serta mengarahkan bahwa memilih merupakan suatu tanggung jawab sebagai warga negara serta selaku muslim.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, observasi lapangan, dan kajian dokumen, dan analisis sesuai dengan pokok penyajian data. Temuan penelitian diawali dari penyajian data, dilanjutkan ke fokus penelitian.

Langkah kerja penelitian ini dimulai dari fokus penelitian yaitu Mengapa Kyai berperan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kebumen? Fokus tersebut telah dijabarkan pada beberapa subfokus, seperti 1) keberadaan pondok pesantren di Kabupaten Kebumen; 2) peran kyai di pilkada Kabupaten Kebumen; dan 3) Kyai NU dalam politik Pilkada di Kabupaten Kebumen. Bagaimana Kyai berperan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020? Fokus tersebut dijabarkan pada peran Kyai Fakhruddin Pada Calon Pilkada Arif-Rista. Dari uraian penelitian di atas, diperoleh teori hasil penelitian berikut:

- a. Setiap Kyai di Kabupaten Kebumen memiliki pondok atau pendopo, hampir 74 pondok yang sudah didirikan di sekitar wilayah Kabupaten Kebumen
- b. Peran kyai sebagai penyambung lidah dan tindakannya selalui dikuti oleh setiap murid/pengikutnya
- c. Kyai NU menerapkan ajaran islamia dalam setiap pengambilan keputusan
- d. Peran Kyai dalam pilkada Kabupaten Kebumen 2020 yaitu sebagai tempat untuk meminta dan memperoleh doa, menarik pengikut Kyai agar dapat memilih calon Pilkada, dan memenangkan hasil pemilihan sebagaimana yang juga diterapkan oleh Pilkada Arif-Rista bersama Kyai Fakhruddin.